

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

← MARRIAGE  
DIVORCE →

NIKAH *dan*  
SIRI CERAI  
DI INDONESIA SIRI

*Tinjauan Pluralisme Hukum Progresif*

# **NIKAH SIRI DAN CERAIR SIRI DI INDONESIA**

**(Tinjauan Pluralisme Hukum Progresif)**

Oleh

**Prof. Dr. H. Faisal, SH, MH**

**Pusat Penelitian dan Penerbitan  
IAIN Raden Intan Lampung  
2015**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**© Hak cipta pada pengarang**

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : NIKAH SIRI DAN CERAIR SIRI DI INDONESIA  
(Tinjauan Pluralisme Hukum Progresif)  
Penulis : Prof. Dr. H. Faisal, SH, MH  
Cetakan  
Pertama : Desember 2015  
Desain Cover : Tim  
Layout oleh : Tim

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
IAIN Raden Intan Lampung  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame  
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "NIKAH SIRI DAN CERAI SIRI DI INDONESIA (Tinjauan Pluralisme Hukum Progresif)" tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan buku *NIKAH SIRI DAN CERAI SIRI DI INDONESIA (Tinjauan Pluralisme Hukum Progresif)* diharapkan dapat memperkaya referensi baik mahasiswa maupun akademisi dalam kajian fenomena kawin cerai di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kiranya para pembaca berkenan memberi sumbang saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat berguna bagi kita semua.

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—iii

DAFTAR ISI—iv

BAB I FENOMENA KAWIN-CERAI DI INDONESIA—1

A. Pendahuluan—1

B. Pengertian perkawinan/pernikahan—10

BAB II MENAKAR MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA—21

A. Mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga—21

1. Kekerasan fisik—24

2. Kekerasan Psikis—24

3. Kekerasan seksual—24

4. Penelantaran rumah tangga—24

B. Hak, Perlindungan, dan Pemulihan Korban KDRT—25

C. Kewajiban Pemerintah dan masyarakat pada korban KDRT—28

1. Pemerintah—29

2. Kepolisian—30

3. Pengadilan —31

4. Tenaga Kesehatan—32

5. Masyarakat—33

D. Ketentuan Pidana Pelaku KDRT—33

E. Korban kekerasan— 35

F. Ketentuan, mekanisme pelaporan dan permohonan perintah perlindungan—36

1. Pelapor—36

2. Saksi dan Alat Bukti—37

### **BAB III PROBLEMATIKA DAN DAMPAK KAWIN CERAI—39**

- A. Reinterpretasi makna pernikahan dan perceraian—39
- B. Perceraian —53

### **BAB IV PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KAWIN-CERAI**

- A. Tugas pokok peradilan agama—81
- B. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam—110
- C. Proses perceraian dalam perkembangan perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama—117
- D. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga—147

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## FENOMENA KAWIN - CERAI DI INDONESIA

---

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah fitrah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur

mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

*Akad* perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan,<sup>1</sup> oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal.206

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal.36



disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah S.W.T, Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,*

*sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).*

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.<sup>3</sup> Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan

---

<sup>3</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit, Hal.

berkehormatan. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian perkawinan tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideology dan pemahaman budaya masyarakat.

Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

---

<sup>4</sup> Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di pengaruhi factor ideology*, [Http://.www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku



dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. *Patriarkhal* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif, maka hal tersebut tidaklah dapat diterima dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi makamempertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia.<sup>6</sup>

Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekcoan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah S.W.T karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada. Sebenarnya perceraian

---

<sup>5</sup> Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Makalah dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April di Unissula Semarang, Hal.1

<sup>6</sup> Ali Hosien Hakeem, *Membela Perempuan*, al-huda, Jakarta, 2005, Hal.255

merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T, maka dengan demikian, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.<sup>7</sup>

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 255.

<sup>8</sup> Kompas Perempuan, *Referensi bagi hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*, <http://www.kompasperempuan.com>. Hal.81

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.<sup>9</sup>

## **B. Pengertian Perkawinan/ Pernikahan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah

---

<sup>9</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994, Hal.35

adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Istilah “Nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *alnikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u* atau *‘ibaaat ‘an al-wath wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>11</sup>

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.1

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilillatuhi*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Hal.29

berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.<sup>12</sup>

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan *prolog* dan *epilognya*, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal.1 dan 2



Masalah Perkawinan dalam Al-Qur'an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melaikan diterangkan secara tafsili/terperinci.<sup>13</sup>

Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>14</sup>

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

---

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hal.45

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal. 2 dan 3

keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak keluarga masing-masing calon mempelai juga diharapkan untuk memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu.<sup>15</sup>

Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, *talak*, dan *rujuk* bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).<sup>16</sup>

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 6 dan 7

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 14

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebijakan tuntunan agama.<sup>18</sup>

### **C. Pengertian Perceraian**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan. Banyak Sosiolog mengemukakan bahwa berhasil

---

<sup>17</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 Hal.15

<sup>18</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, Hal.68

atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal.8

mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 8 dan 9



Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan pemboros, pemakai obat-obat terlarang);
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (pergi tanpa kabar berita);
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 17

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara cerai *talak* dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai *talak* diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar *talak* kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.<sup>22</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan beberapa mengenai alasan perceraian selain alasan cerai yang ditetapkan secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Penjelasan Pasa. 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Suami melanggar *taklik talak*; dan
- b. Peralihan agama atau *murtad*.

Penambahan ini di dasarkan atas pengalaman selama ini. Sering Pengadilan Agama menerima gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama (*murtad*). Alasan penerimaan yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal.18

<sup>23</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.46

dilakukan Hakim ditinjau dari segi Hukum Islam, hal itu sangat beralasan untuk memecahkan perkawinan walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur secara sefesifik *murtad* sebagai alasan cerai.

## **BAB II**

### **MENAKAR MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

#### **A. Mengenai Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan’ diartikan dengan prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsure yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-pasal KHUP tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam

---

<sup>1</sup> Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal.37

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.<sup>2</sup> Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan.

Dengan kata lain bahwa Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1, ayat 1.

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Op.Cit*, Hal.31

### **1. Kekerasan fisik;**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

### **2. Kekerasan psikis;**

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### **3. Kekerasan seksual;**

Kekerasan seksual, meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **4. Penelantaran rumah tangga.**

Penelantaran rumah tangga ada perbuatan di mana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran

dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keterunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak isteri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak makannya dibandingkan isteri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.<sup>3</sup>

Sebagai kesimpulan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

## **B. Mengenai Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 42



## **BAB IV**

### **PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KAWIN - CERAI**

---

#### **A. Tugas Pokok Peradilan Agama**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Di Indonesia**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama di Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta pengengkatan anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada Tahun Hijriyah. Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

## 2. Fungsi Peradilan Agama di Indonesia

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan

maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d.* Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan Administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e.* Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f.* Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

### 3. Tugas dan Jabatan

#### a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksana tugas Pengadilan Agama.

- 2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- 3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Peradilan Agama.

b. Wakil Ketua

- 1) Memimpin Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama ketika Ketua berhalangan.
- 2) Menetapkan sasaran setiap kegiatan bersama-sama Ketua.
- 3) Menetapkan dan mewujudkan rencan kegiatan bersama-sama Ketua.
- 4) Membagi tugas dan menentukan pertanggungjawaban kegiatan bersama-sama Ketua.
- 5) Menentukan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan perintah dari Ketua.

c. Hakim Pratama Madya dan Hakim Pratama Utama

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannyasera pengorganisasiannya.

- 2) Mengikuti siding yang ditugaskan oleh Ketua dan mengonsep putusan.
- 3) Melaksanakan tugas yang diselegasikan oleh Ketua
- 4) Hakim Pengawas bidang permohonan.
- 5) Memberikan laporan tertulis perkara atau hasil pengawasan setiap akhir bulan pada Ketua.

d. Panitera/Sekretaris

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program jangka pendek, panjang, pelaksanaannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat Ke-Paniteraan
- 3) Dibantu Wakil Paniteradan Panitera Muda menyelenggarakan Administrasi secara cermat mengenai jalannyaperkara maupun keuangan.
- 4) Bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ke-3 juga buku lainnya yang disimpan di Ke-Paniteraan.
- 5) Membuat akta dan salinan perkara
- 6) Menerima dan mengirim berkas perkara.
- 7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT).

e. Wakil Panitera

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan di Pengadilan Agama.
- 2) Membantu Panitera untuk secara langsung, membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas Administrasi Perkara, ketertiban dalam mengisi buku Registrasi perkara membuat laporan periode dan menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera berhalangan hadir

f. Panitera Muda Hukum

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan di Pengadilan.
- 2) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, ketertiban, dan mengisi buku register perkara, membuat laporan periode dan menggerakkan serta mengarahkan melaksanakan kegiatan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera berhalangan hadir.



- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya.

g. Panitera Muda Gugatan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan gugatan dan menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun serta menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 2) Member tugas dan menentukan penanggung jawab, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Membantu tugas bawahan.
- 4) Menrima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 5) Membukukan dalam buku register tentang penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada urusan keuangan/bendahara.

h. Panitera Muda Permohonan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan Kepaniteraan permohonan dan menetapkan sasaran kegiatan setiap Tahun serta menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

- 2) Member tugas dan menentukan penanggung jawab, menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Membantu tugas bawahan.
- 4) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 5) Membukukan dalam buku register tentang penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM Perkara Permohonan untuk pembayaran panjar perkara kepada urusan keuangan/bendahara.

i. Kasubbag Kepegawaian

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas sub Kepegawaian.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di Sub Kepegawaian.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA

j. Kasubbag Umum

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Bagian Umum
- 2) Mengontrol jalannya surat masuk dan surat keluar.
- 3) Mengkodefikasi barang inventaris kantor.

- 4) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 5) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di Sub Bagian Umum.
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA.

k. Kasubbag Keuangan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas sub Bagian Keuangan
- 2) Menetapkan sasaran setiap akhir tahun.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 4) Menyusun laporan bidang keuangan rutin dan pembangunan.
- 5) Membuat rekomendasi revisi DIPA.
- 6) Menyusun rencana penerimaan dan pembangunan dana APBN setiap tahun dan setiap Kwartal.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **2. Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama**

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan Agama yang diakui dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi dengan

dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa seluruh sistem pembinaan peradilan disatukan dalam wadah Mahkamah Agung, seraya dengan hal tersebut, disana-sini timbul keragu-raguan dipelbagai starta mengenai kedudukan dan wewenang Peradilan Agama tadi. Hal ini Nampak jelas di Instansi Departemen Agama yang khawatir kehilangan kendali administrative atas Lembaga Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada Tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekeuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternative kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, sehingga jelaslah yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkunagan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang selama ini sering terjadi tilik singgung kewenangan mengadili.

#### 1. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “Kekuasaan” disini sering disebut dengan “kompetensi”, berasal dari Bahasa Belanda “*Competentie*” yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “*kewenangan*”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Berbicara mengenai kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu : tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.

a. Kekuasaan Relatif

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan atau kompetensi relative diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Misalnya :

Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Binjai, Pengadilan Agama Banda Aceh dengan Pengadilan Agama Aceh Besar, Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama. Adapun penjelasan yang terkandung dalam pasal tersebut mensinyalir bahwa pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau ibukota Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama wilayah hukumnya bias saja meliputi lebih dari satu Kabupaten, bila Kabupaten terdekat belum ada Pengadilan Agama. Demikian pula untuk Pengadilan Tingginya. Contoh: Pengadilan Tinggi Agama Mataram, wilayah hukumnya meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Ini karena wilayah provinsi tersebut belum terdapat Pengadilan Tinggi Agama. Pembentukan suatu Pengadilan Agama beserta

pembagian wilayah hukumnya didasarkan atas Undang-Undang.<sup>1</sup>

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, dimana para pihak akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi Tergugat.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelas mengenai sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung seperti halnya diatur oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama, Teori dan Prakteknya dalam proses Peradilan Agama*, Cet I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, Hal.72

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi 2, Cetakan 6, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal.26

Nomor 5 Tahun 2004, adalah sengketa kewenangan mengadili, meliputi :

- 1) Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan peradilan lainnya.
- 2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan Peradilan yang sama.
- 3) Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan yang sama antara lingkungan Peradilan yang berlainan.

Adapun sengketa kewenangan mengadili terjadi apabila:

- 1) Dua Pengadilan atau lebih mengatakan berwenang mengadili perkara yang sama.
- 2) Dua Pengadilan atau lebih mengatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- 3) Jika terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih dimana yang mengatakan berwenang mengadili perkara yang sama, maka tata cara penyelesaian sengketanya dapat ditempuh dengan solusi sebagai berikut:



- a) Pihak berperkara atau dalam hal ia tidak mengajukannya, maka Ketua Pengadilan Agama karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kewenangan mengadili.
- b) Apabila permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau oleh Ketua Pengadilan Agama karena jabatannya, maka Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang bersangkutan harus menunda pemeriksaan perkara tersebut yang dituangkan dalam bentuk **PENETAPAN**“, sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- c) Pengadilan Agama yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan **“PENETAPAN”** penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama.

- d) Pengadilan lain yang menerima salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut, harus pula menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai dengan sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- e) Sedangkan untuk terjadinya sengketa kewenangan mengadili antar dua Pengadilan atau lebih yang sama-sama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama. Dalam pengajuannya, ia (pemohon/tidak berperkara) dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996, Tanggal 7 Mei 1996, Tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata

b. Kekuasaan Absolut

Kompetensi absolut yang dikenal dengan istilah kompetensi mutlak, menurut para ahli adalah “kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari sesuatu jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain”.<sup>4</sup> Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dari kekuasaan atau kompetensi absolut adalah persoalan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.<sup>5</sup>

Selain kedua rumusan tersebut ada juga yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan atau kompetensi absolut/mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan, yang dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan yang lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, Hal.29

<sup>5</sup> Retno Wulan Sutantio dan Oepikawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989, Hal.8

<sup>6</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agma*, Cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal.27

Bila kita bandingkan dari ketiga rumusan pengertian kekuasaan absolut dari para ahli tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan mutlak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili perkara yang diberikan Negara (Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan masing-masing. Adapun contoh konkritnya : kekuasaan yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama akan berbeda dengan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang kepada pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Kekuasaan Absolut berarti kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis-jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan pengadilan, perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan lain. Misalnya : Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan yang bukan Islam menjadi wewenang Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan

mengadili dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Terhadap kekuasaan absolute ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatannya yang disebut dengan “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malah sampai ke tingkat banding atau tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan menyangkut tentang kekuasaan absolut Pengadilan Agama, antara lain:

- 1) Untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam, ini berarti orang-orang yang tidak beragama Islam maka ia tidak dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 2) Untuk bidang-bidang tertentu, yaitu:
  - a) Perkainan.
  - b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
  - c) Waqaf dan shadaqah.
  - d) Sedangkan untuk kekuasaan atau kompetensi absolute Pengadilan Tinggi Agama, selain bidang-bidang perkara tersebut di tingkat banding, juga oleh Undang-Undang diberi wewenang mengadili sengketa kewenangan di tingkat pertama dan terakhir yang terjadi antar Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.
  - e) Disamping wewenang mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Undang-Undang juga memberikan wewenang lain untuk:

- (1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta. Produknya bukan penetapan dan bukan pula putusan tetapi surat biasa.
- (2) Memberikan pertolongan kepada masyarakat Islam yang memohon pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan (warisan) di luar sengketa. Produknya bukan putusan dan bukan pula penetapan. Sehingga ia tidak mengikat bagi masyarakat (ahli waris) yang memintanya.<sup>7</sup>

### **3. Proses Beracara Pada Pengadilan Agama Tanjungkarang**

#### **a. Administrasi Perkara**

##### **1. Pendaftaran Perkara**

*Pertama* : pihak berperkara datang ke pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan

*Kedua* : pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.

---

<sup>7</sup> Taufiq Hamami, *Op.Cit*, Hal.46

*Ketiga* : petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Catatan :

- 1) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
- 2) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
- 3) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan



disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

*Keempat* : petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

*Kelima* : pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

*Keenam* : Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) membutuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

*Ketujuh* : Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara ke bank.

*Kedelapan* : Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyeteran. Kemudian pihak

berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

*Kesembilan* : setelah pihak perkara slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak perkara menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

*Kesepuluh* : pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak perkara. Pemegang kas kemudian member tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak perkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

*Kesebelas* : Pihak perkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

*Keduabelas* : Petugas meja kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta member nomor register pada surat

gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

*Ketigabelas* : petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

## 2. Persiapan Persidangan

Setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai, asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/MS melalui Panitera. Berkas perkara diserahkan oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.

### 1) Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan.

### 2) Penetapan Hari Sidang (PHS)

Yaitu penetapan hari akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu penetapan Hari Sidang (PHS)

oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Jurusita penggantin memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.

### 3) Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah penetapan hari sidang, tahap selanjutnya ialah penunjukan panitera pengganti. Panitera menerima kembali berkas perkara yang telah diberi PMH dan menunjuk panitera pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dengan suatu penetapan. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui petugas meja II.

### 4) Pemanggilan pihak-pihak

Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita /juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Pemanggilan pihak-pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut).

## **b. Pelaksanaan Persidangan**

### a. Ketentuan Persidangan

#### 1) Konfirmasi identitas para pihak

- 2) Penelitian relas panggilan
- 3) Upaya damai
- 4) Proses jawab menjawab
- 5) Tahap pembuktian

b. Berita acara persidangan (BAP)

Berita acara siding ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pelaksanaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar majelis hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang di adilinya. Sebagaimana yang telahdi tentukan dalam Pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg.

c. Rapat PMH

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan akhir (konklusi), maka majelis hakim bermusyawarah dalam suatu rapat yang bersifat rahasia (bias dalam ruang siding atau ruang kerja). Dalam rapat permusyawaratan yang didengar pertama adalah pendapat hakim anggota yang paling muda (junior), kemudian pendapat hakim senior, dan yang terakhir majelis hakim. Setelah itu hasil putusan dirumuskan dalam rapat permusyawaratan tersebut, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka suara terbanyak menjadi putusan majelis.

d. Putusan

Pembacaan putusan hakim harus dilakukan dalam siding terbuka untuk umum. Dibacakan secara bergantian antara ketua majelis hakim dan dua hakim anggotanya. Untuk pembacaan amar putusan langsung dibacakan oleh ketua majelis hakim, karena setelah selesai pembacaan amar putusan akan diikuti dengan ketukan palu yang dilakukan ketua majelis hakim itu sendiri.

e. Pemberitahuan isi putusan

Jika penggugat atau tergugat tidak hadir dalam siding pembacaan putusan, maka panitera/panitera pengganti harus memberitahu isi putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Jika para pihak tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, maka pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah tingkat II untuk diumumkan.

**B. Analisis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konseptual telah meletakkan pengertian yang lebih *progresif* tentang kekerasan

dalam rumah tangga, karena karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berhubungan erat dengan keluarga, maka secara tidak langsung Peradilan Agama juga menjadi salah satu lembaga hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menyelesaikan perkara yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Secara prosedural, Peradilan Agama bukanlah lembaga hukum yang memiliki kewenangan secara langsung untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi karena kekerasan dalam rumah tidak jarang berakibat pada terjadinya perceraian yang merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama, maka hal tersebut meletakkan Peradilan Agama pada posisi yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang dalam sebuah rumah tangga memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menampeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar.

Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, maupun ancaman. Perempuan dijadikan sasaran



pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar rumah tangga.<sup>8</sup>

Kekerasan berdimensi ekonomi, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan seksual, yakni kekerasan yang mengarah kepada serangan terhadap seksualitas seseorang, bisa berupa pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus-menerus hamil atau menggugurkan kehamilan.

Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental,

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *op.cit.*, hlm. 32.

maupun ekonomi, dan yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang pada akhirnya menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan perceraian, karena secara substansial konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas juga terdapat dalam rumusan alasan-alasan yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan perceraian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah dengan :

- a) Suami melanggar *taklik talaknya*;
- b) Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Beberapa alasan perceraian tersebut di atas, walaupun secara redaksional tidak sama persis dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, akan tetapi secara substansi alasan perceraian tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun di atas relasi yang penuh kekerasan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun, dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan baik oleh istri (*khuluk*) maupun suami (*talak*). Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan

dan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi hal-hal berikut :

- a) Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan penyakit masyarakat lain;
- b) Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain;
- c) Adanya unsur pertengkaran, percekocan, kekerasan, kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) setelah semua upaya yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana dinamika korban untuk menuju keputusan terberat ini dalam kehidupan rumah tangganya.

Perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya, di sisi lain istri harus menanggung *stigma* masyarakat yang masih menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat. Predikat janda cerai merupakan *momok* bagi para perempuan di dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan untuk bercerai dilakukan, maka artinya dia telah memulai menempuh jalan terjal berikutnya dalam kehidupan

sosial yang tidak selalu berpihak padanya. Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai.

### **C. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.**

Prinsip-prinsip pokok Peradilan Agama pada dasarnya berinduk pada prinsip-prinsip pokok peradilan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di luar prinsip-prinsip tersebut, misalnya bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Mengingat bahwa Peradilan Agama berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan lembaga yang relative baru, sehingga penguraian prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah hal yang *urgen*.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi perkara di Peradilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.228

Dapat diinventarisasi beberapa prinsip pokok Peradilan Agama, di antaranya adalah :<sup>10</sup>

- a. Menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam;

Prinsip ini terkandung dalam rumusan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 1 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama”. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara (tertentu) bagi pencari keadilan yang beragama Islam dan bukan orang-orang yang tidak beragama Islam. Jadi prinsip ke-Islaman merupakan prinsip pokok. Permasalahannya adalah bagaimana membuktikan yang bersangkutan beragama Islam, secara formal dapat dibuktikan melalui surat-surat keterangan resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan sebagainya. M. Yahya Harahap berpendapat : “Letak patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkan patokan ‘umum’ dan patokan saat terjadi hubungan hukum”. Maksud patokan

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 69.

menentukan ke-Islaman seseorang di dasarkan pada faktor “formil” tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari Kartu Tanda Penduduk, sensus kependudukan, Surat Izin Mengemudi, dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar “saat terjadi” hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat :<sup>11</sup>

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam;
- 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan Hukum Islam.

b. Peradilan terhadap perkara perdata tertentu;

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, garis besarnya cakupan perkara perdata tertentu tersebut meliputi bidang-bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) *Hibah*;
- 5) *Wakaf*;
- 6) *Zakat*;
- 7) *Infaq*;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

- 8) *Shadaqah*; dan
- 9) Ekonomi *syari'ah*.

Bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud bidang perkawinan tersebut .

Adapun yang dimaksud dengan bidang kewarisan, meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, apabila pewarisan dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

c. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Prinsip ini berakar dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni Pasal 4 ayat (1). Mengingat prinsip demikian berakar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentu saja prinsip peradilan ini dianut oleh lingkungan peradilan-peradilan lain. Perlu diingat bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah



sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di samping itu, prinsip yang demikian adalah mengikat Hakim karena sumpah jabatannya, maka dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengaturan “peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diatur melalui Pasal 57 ayat (1). Makna dan prinsip ini dalam Peradilan Agama pasti tidak berbeda dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu mengikat kepada Hakim dalam setiap memberikan keputusannya bertanggung jawab kepada :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

- 1) Hukum;
- 2) Diri sendiri;
- 3) Rakyat; dan juga
- 4) Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila disimak Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang membedakan dengan lingkungan peradilan lain maka dalam setiap penetapan dan keputusannya dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” yang diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- a) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Prinsip ini oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diatur melalui Pasal 57 ayat (3). Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 termaktub pada Pasal 4 ayat (2). Makna peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana”

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.” Jadi dengan prinsip ini, di samping para pencari keadilan mampu beracara di depan Peradilan Agama, sekaligus dapat tercipta kepastian hukum sebagaimana yang diharapkannya tanpa menunggu waktu yang lama. Dengan prinsip ini juga merupakan perintah kepada Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*vide* Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

Prinsip ini tercantum di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berakar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1).

Prinsip demikian, selain menegaskan adanya supremasi hukum juga menetapkan adanya persamaan bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*), sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian harus diingat bahwa yang dimaksud setiap orang adalah para pencari keadilan yang beragama Islam. Tidak membedakan orang adalah tidak membedakan status sosial dan kedudukan pencari keadilan dalam masyarakat.

f. Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum;

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Prinsip bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum selanjutnya oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Bunyi selengkapnya redaksi Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah :

“Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam

berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”.

Menggaris bawahi hal di atas, jelas secara prinsip sidang Pengadilan terbuka untuk umum, namun undang-undang juga memberikan pengecualian-pengecualian sehingga sidang dilakukan secara tertutup.

Pengecualian ini antara lain adalah dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian, artinya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (*vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Mengenai tujuan dan sidang terbuka untuk umum pada pokoknya adalah mewujudkan peradilan yang tidak memihak, berat sebelah dan persidangan yang *fair (fair trail)*. Walaupun begitu mengingat aspek kejiwaan, untuk menjaga kerahasiaan rumah tangga dan sebagainya maka sidang perceraian dilakukan secara tertutup.

Perlu diperhatikan bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas adalah seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum (*vide* Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 *juncto* Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

g. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ditentukan bahwa penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Isi pasal ini bermuara pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan rumusan Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa ketentuan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, merupakan suatu keharusan. Kewajiban baik bagi sidang yang terbuka untuk umum maupun sidang tertutup. Oleh karena suatu keharusan, maka apabila dilanggar akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap berpendapat :  
“Ketentuan ini bersifat ‘imperatif’ dan bernilai sebagai aturan ‘ketertiban umum’ yang tak bisa di kesampingkan dengan alasan apapun”. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan putusan “batal demi hukum”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 62.

Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, akan tetapi berdasar prinsip ini, putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Di luar ketujuh prinsip yang telah diuraikan di muka, tentu masih ada prinsip-prinsip lain, seperti Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya (*vide* Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

Selain itu, prinsip lain yang mengukuhkan eksistensi Peradilan Agama adalah sama/ sederajat dengan peradilan lain sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah dihapuskannya pengukuhan dan Pengadilan Negeri terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan demikian sekaligus mencabut isi Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 selain mengatur tentang susunan dan kekuatan Peradilan Agama, di dalamnya sekaligus mengatur tentang Hukum Acaranya. Hukum Acara dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 38 pasal.<sup>14</sup>

Tidak semua Hukum Acara Peradilan Agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan sebagai berikut :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian akan tampak hubungan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBG. Hubungan kedua hukum dimaksud adalah, Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 53.



sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedangkan HIR dan RBG sebagai hukum umum (*lex generalis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dipergunakan, maka ketentuan dalam HIR atau RBG tidak lagi dipergunakan.

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila undang-undang sudah mengatur khusus acara pembuktian, dengan sendirinya Hakim tidak akan memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau RBG. Sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang tidak diatur secara khusus, Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan. Kelima acara pembuktian di atas perinciannya sebagai berikut :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 54

- a. Pembuktian dalam permohonan cerai *talak* (Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaq* (Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- e. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan zina (Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Berhubung acara pembuktian menyangkut masalah perceraian perkawinan, maka ada baiknya apabila diketahui mengenai alasan-alasan perceraian yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Untuk putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perceraian dibagi menjadi dua, yakni cerai *talak* dan cerai gugat. Berikut ini adalah pembuktian dalam permohonan cerai *talak* dan cerai gugat :

a. Pembuktian dalam permohonan cerai *talak*;

Pengertian *talak* menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah “pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami”.<sup>16</sup> Menurut Shodiq dan Shalahuddin Chaery adalah “*talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan

---

<sup>16</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 108.

secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/*sharih* ataupun dengan kata-kata sindiran/*kinayah*”. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ternyata tidak memuat pengertian formal dari cerai *talak* ini. Pengertiannya dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Disebutkan, “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”. Jadi cerai *talak* adalah putusnya perkawinan atas prakarsa suami yang ditandai pengucapan ikrar *talak* melalui sidang Pengadilan Agama.

Dalam bahasa Hukum *Syari'ah*, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Tetapi, *Syari'ah* tidak menyukai perceraian. Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkan menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul A'la Al Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987, hlm. 35.

Sebagaimana telah diketahui, dalam hukum agama kekuasaan untuk menjatuhkan *talak* berada pada pihak suami. Untuk melakukan perceraian diharuskan melalui putusan Pengadilan. Karena itu suami yang akan *menalak* istrinya, mengajukan permohonan cerai *talak* ke Pengadilan Agama.

Mengenai pembuktiannya Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Untuk mengabulkan permohonan cerai *talak*, Hakim diperintahkan dalam pembuktiannya untuk menyimpulkan dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang hasilnya :<sup>18</sup>

- 1) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan;
- 2) Telah cukup alasan perceraian.

Kesimpulan yang diperintahkan tersebut, dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, tampak bahwa pembuktian dalam

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 61.

permohonan ini mempergunakan alat bukti persangkaan-persangkaan.

Persangkaan-persangkaan yang dimaksud, bukan persangkaan-persangkaan berdasarkan undang-undang karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak secara khusus menentukan fakta-fakta apa yang harus disimpulkan, melainkan Hakim menentukan hasil kesimpulan yang telah ditarik.

Jadi yang dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah persangkaan-persangkaan yang ditarik oleh Hakim. Di sini Hakim bebas memilih fakta-fakta yang diperoleh di persidangan untuk ditarik kesimpulan yang hasil kesimpulannya telah ditentukan.

Contohnya : <sup>19</sup>

1. Hakim dapat menyimpulkan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a) Pernah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
  - b) Selama proses perkaranya berlangsung, kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm.61

2. Kemudian tentang kesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, Hakim dapat menarik dari peristiwa-peristiwa istri pemboros, istri senang berjudi. dan istri banyak membuat hutang.

Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim tersebut, dalam perkara permohonan cerai *talak* merupakan bukti yang sempurna. Dengan pertimbangan yang di dasarkan kepada kedua persangkaanpersangkaan sangat menentukan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Ditentukan bahwa perkawinan putus sejak ikrar *talak* diucapkan, dan untuk itu Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan itu putus. Ditetapkan selanjutnya oleh Pasal 71 ayat (2) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Berlainan dengan penetapan cerai *talak* maka penetapan tentang putusnya perkawinan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal itu dikarenakan pengucapan ikrar *talak* dilakukan setelah penetapan cerai *talak* mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga penetapan ikrar *talak* yang menandai perkawinan itu putus merupakan pelaksanaan atau eksekusi penetapan cerai *talak* yang telah

mempunyai kekuatan hukum tersebut. Selain itu ketentuan tiadanya upaya hukum terhadap penetapan ikrar *talak* juga bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Bahkan tidak saja upaya hukum banding dan kasasi, akan tetapi perlawanan (*verzet*) juga tidak dapat diajukan bagi penetapan ikrar *talak* ini. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan :<sup>20</sup>

“Boleh dikatakan, penetapan sidang ikrar *talak* tiada lain dari pelaksanaan eksekusi penetapan cerai *talak*. Itu sebabnya Pasal 71 ayat (2) secara tegas menentukan bahwa terhadap penetapan sidang ikrar *talak* tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Ketentuan pasal ini merupakan asas ketertiban umum yang mengajarkan, banding atau kasasi tidak dapat diminta terhadap pelaksanaan eksekusi putusan. Malahan kita berpendapat bukan hanya upaya banding dan kasasi saja yang tertutup terhadap penetapan sidang ikrar *talak*. Tetapi juga perlawanan atau *verzet*”.

b. Pembuktian dalam permohonan cerai gugat;

---

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 250.



Berlainan dengan cerai *talak*, yaitu inisiatif permohonann cerai adalah pihak suami, maka dalam cerai gugat justru istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Pembahasan perihal pengajuan gugatan tidak dapat dilupakan adalah masalah kewenangan (kompetensi) Pengadilan yang memeriksa cerai gugat. Hal ini disebabkan bahwa pengajuan gugatan haruslah sesuai dengan kewenangan Pengadilan yang berlaku. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menempatkan pengajuan gugatan yang sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan tersebut terutama dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan dalam pasal yang dimaksud pada pokoknya adalah :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

3. Apabila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menyimak redaksi di atas, nyatalah bahwa Pengadilan yang berwenang terutama adalah yang meliputi tempat kediaman Tergugat (istri), kecuali :<sup>21</sup>

- 1) Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami);
- 2) Istri bertempat kediaman di luar negeri.

Dengan demikian terlihat, baik dalam cerai *talak* maupun cerai gugat kedudukan istri secara hukum (yuridis) dilindungi. Terdapat tiga pasal yang melegalisir alasan-alasan gugatan perceraian, yaitu Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembuktian dalam perceraian di dasarkan atas alasan yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 84.

- a. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*;

*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. *Syiqaq* ini juga merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan dalam cerai gugat. Tentang *syiqaq* ini, ditetapkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disyaratkan bahwa antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan ini, maka sebagai bukti harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri tersebut. Perlu diingat bahwa keterangan saksi di sini berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya oleh Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

dinyatakan bahwa setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*. *Hakam* ini adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Jadi peran *hakam* ini dapatlah dikatakan sebagai pendamai. Mengingat pengangkatannya oleh pengadilan, tentu *hakam* dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada pengadilan.<sup>22</sup>

Selanjutnya tentang pembuktian dalam gugatan itu Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut :

1. Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

---

<sup>22</sup> *bid.*, hlm. 85-86.

2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa untuk membuktikan peristiwa *syiqaq* dipergunakan alat bukti :

1. Keterangan saksi-saksi;
2. Saksi berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.

Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia di dalam kehidupan rumah tangga, sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya. Oleh karena itu peristiwa *syiqaq* lebih mudah dibuktikan melalui saksi.

Kemudian undang-undang menginginkan saksi-saksi itu diajukan berasal dari keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan suami istri. Saksi dari keluarga suami-istri itu, yaitu keluarga sedarah dan semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, misalnya anak, orang tua, ipar, dan mertua, memang diperkenankan menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut Hukum Perdata, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak, yaitu pembantu rumah tangga atau tetangga mereka. Orang-orang tersebut oleh undang-undang dipandang mengetahui peristiwanya sehingga boleh diajukan sebagai saksi.

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Pengadilan Agama diinstruksikan bahwa dengan mendengar keterangan para saksi akan mengetahui sifat persengketaan, yang maksudnya Hakim harus dengan arif dan bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh mana perselisihan suami istri tersebut.

Kalau perselisihan itu sifatnya sudah mengancam rumah tangganya akan tidak jatuh lagi, di sini Hakim karena jabatannya berwenang mengangkat *hakam* dari

masing-masing pihak. Undang-undang mensyaratkan bahwa *hakam* yang diangkat berasal dari pihak keluarga ataupun orang lain.

b. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan zina;

Pembuktian dalam perkara ini diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan :

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau Penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan Termohon atau Tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari Termohon atau Tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah;
2. Pihak Termohon atau Tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Membuktikan perbuatan zina termasuk hal yang tidak mudah dilakukan berhubung perbuatan itu dilakukan secara tertutup atau dengan sembunyi-sembunyi sehingga sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang telah member petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun sebelum sampai kepada pembuktian dengan sumpah, disyaratkan harus ada bukti permulaan. Gugatan yang disangkal oleh Tergugat, pihak penggugat harus membuktikan gugatannya. Dalam perkara yang demikian, kemungkinan penggugat hanya dapat mengajukan saksi-saksi dari orang yang kebetulan melihat Tergugat pergi berdua oengan teman yang berlainan jenis. Sudah tentu dari bukti-bukti yang diajukan itu dinilai Hakim kurang dapat membuktikan peristiwa dimaksud dalam gugatan. Kemudian selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti-bukti lain yang melengkapi, baik dari penggugat maupun Tergugat. Di sini Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah.

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 70.



Sumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan zina selalu dibebankan kepada penggugat sebagai sumpah pelengkap. Apabila sumpah yang diperintahkan oleh Hakim itu dilakukan oleh suami, penyelesaiannya dilakukan dengan cara *li'an*.

Penyelesaian yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sumpah yang diatur dalam Al Qur'an (Surat An Nur). Dalam *li'an* yang mengangkat sumpah si suami sebanyak lima kali. Sumpah dilakukan dengan menyebutkan nama Allah, sebanyak empat kali mengucapkan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada istrinya adalah benar, kemudian satu kali mengucapkan bahwa *laknat* Tuhan akan menimpa dirinya kalau ia berdusta.

Dalam *li'an* si istri diberi kesempatan untuk bersumpah untuk dapat terhindar dari hukuman. Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas. Dengan nama Allah, istri (Tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya telah berdusta. Kemudian sumpah kelima mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan

menimpa dirinya, apabila yang dituduhkan oleh suaminya ternyata benar.

Sebaliknya apabila sumpah yang diperintahkan Hakim dilakukan oleh istri (penggugat), Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menginginkan penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Karena yang dimaksudkan itu memberlakukan hukum pembuktian dalam HIR atau RBG, maka ketentuan Pasal 87 ayat (2) undang-undang 124 bersangkutan harus di kesampingkan. Jadi pihak lawan tidak perlu diberi kesempatan untuk bersumpah seperti dalam *li'an*. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim tersebut, lazim disebut sumpah *suppletioir*.<sup>24</sup>

Dalam kenyataan, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama jarang ditemui memakai alasan zina. Hal ini memang belum diatur acaranya, padahal Hukum Islam sudah mengaturnya dalam bentuk *li'an* itu. Jika sekarang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Tahun 2006, akan tetapi tidak jelas, Penjelasan Pasal 88 dikatakannya cukup jelas.

- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ini, tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.

Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam acara perdata, yaitu :<sup>25</sup>

1) Alat bukti tertulis (surat) :

a) Akta otentik; dan

b) Akta di bawah tangan.

2) Saksi;

---

<sup>25</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 198.

- 3) Persangkaan-persangkaan;
  - 4) Pengakuan; dan
  - 5) Sumpah.
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya ini sama dengan pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yakni karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menggunakan HIR/RBG sebagai hukumnya.

**3. Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah

penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.

Dengan demikian, kualitas putusan Hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa

Hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan Peradilan Agama juga berbeda dengan Peradilan Umum karena para Hakim Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama.

Empati dari para Hakim sangat mungkin muncul apabila para Hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan

penguasaan dan kemampuan analisis *holistik*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para Hakim untuk memperkuat kemampuan ini, misalnya Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara.

Pada umumnya, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak



kalah berat yang harus ditempuh. Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di Peradilan Agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban. Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya memang Hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi Hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti Hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil *gender* yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat (2) dikatakan Hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata).

Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para Hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara. Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para Hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbasis pada Hukum Islam.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para Hakim Agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama, tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi

di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari keadilan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, Hakim Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya.

Contoh Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tentang alasan perceraian Karena kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor : 0575/Pdt.G/2014/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**HENTIYAS KURNIAWAN** Binti **ACHMADI KURNIAWAN**,  
umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Jalan Galunggung Raya Blok R No. 10  
Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan

Way Halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

## MELAWAN

FAISOL SAEFULLOH Bin DADANG IRIANTO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal beralamat di Jalan Galunggung Raya Blok R No. 10 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor:

0575/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 03 Juni 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2012 di rumah nenek Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa emas 7 gram tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Agung Kalianda sebagaimana bukti berupa Duplikat buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 939/10/XI/2010, tertanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama lebih kurang 3

bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat sampai dengan bulan Januari 2014.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat.
- Tergugat sering melakukan penyiksaan Psikis seperti Penggugat dikurung tanpa dikasih makan.
- Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 dengan sebab Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat, dan sejak saat itupula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah

orangtua Penggugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.

8. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat saudara Tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (FAISOL SAEFULLOH Bin DADANG IRIANTO) terhadap Penggugat (HENTIYAS KURNIAWAN Binti ACHMADI KURNIAWAN).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (HENTIYAS KURNIAWAN Binti ACHMADI KURNIAWAN) Nomor: 187115500920001, yang dikeluarkan oleh Kota Bandar Lampung tanggal 7 Mei 2014, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.1);
  2. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 939/10/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 9 Nopember 2012, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);
- Saksi-saksi:

1. Rahayu binti Arjo Suratin, umur 57. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta / Catering bunda , bertempat tinggal di Jl.Kelengkeng 2 No : 132 Lk 6 Perumdam. Way Hui. Kecamatan Jati Agung . Lampung Selatan ;, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah berjalan 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tidak diketahui lagi dimana Tergugat sekarang berada;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
2. Irawati binti H.Ahmad Ramli Rasyid, umur 34. tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsta di Kantor Notaris , bertempat tinggal di Jalan Pulau seribu No.15 Rt.012 Lk.1 Kelurahan Waydady . Kecamatan Sukarame . Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun hanya berjalan beberapa bulan saja setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan (P.2), serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata keduanya cocok, dan alat bukti tersebut adalah merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan demikian maka kedua alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata kedua orang saksi tersebut adalah sebagai orang dekat atau keluarga dekat Penggugat, dengan demikian maka kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya maka kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini, dengan demikian maka sepanjang

mengenai keterangan dua orang saksi di depan sidang yang diajukan oleh Penggugat terasebut juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1), bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Galunggung Raya Blok R No. 10 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Karang;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak atau keturunan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah aqad nikah dahulu Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak pernikahan berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bila

terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkan sesudah akad nikah dahulu yaitu shighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua), dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh, dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, sehingga oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (FAISOL SAEFULLOH Bin DADANG IRIANTO) terhadap Penggugat (HENTIYAS KURNIAWAN Binti ACHMADI KURNIAWAN) dengan iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1435 Hijriyah, yang terdiri Drs. SYAMSUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MAISUNAH, S.H. dan Dra. ELFINA FITRIANI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan ULIANA MA'MUR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SYAMSUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I,  
Anggota II,

Hakim

Dra. Hj. MAISUNAH, S.H.  
FITRIANI

Dra. ELFINA

Panitera Pengganti,

ULIANA MA'MUR, S.Ag

Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mengatur masalah pidana, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang

serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para Hakim.

Menurut pendapat Hakim pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian suami isteri, yaitu sebagai berikut:

Menurut Drs. Khalis (Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang) perceraian di Pengadilan Agama semakin meningkat dari tahun ketahun dan berbagai macam alasannya didalam gugatan Penggugat seperti perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat. Apabila gugatan nya beralasan hukum seperti yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan KHI, maka gugatannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apalagi dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup dan terinci, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mendapatkan kesulitan. Akan tetapi Majelis Hakim belum bisa memasukkannya Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 di dalam pertimbangan Hukumnya

karena Undang-Undang tersebut adalah Kompetensinya Pengadilan Negeri.<sup>26</sup>

Menurut Drs. Ahmad Nur, MH (Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) perceraian harus beralasan hukum seperti UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, KHI dan Inpres No.1 Tahun 1991. Dalam pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 (h) tersebut tidak secara tektual menyebutkan tentang KDRT, oleh karenanya perlu pemahaman secara detil tentang KDRT.<sup>27</sup> Namun bila alasan perceraian seperti diatur dalam pasal 19 huruf (d) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (d) KHI atau huruf (g) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau pelanggaran salah satu takhlik thalak menyakiti badan dan jasmani yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri tentang KDRT, apalagi Vonis tersebut telah memenuhi bunyi pasal 19 huruf (e) PP No.9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (d) KHI dengan penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim melihat dahulu apakah alasan tersebut beralasan hukum atau

---

<sup>26</sup> Khalis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang *Wawancara*, pada tanggal 03 November 2014

<sup>27</sup> Ahmad Nur, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang *Wawancara*, pada tanggal 05 November 2014



tidak, bila alasan tersebut secara rinci atau terurai mendalilkan telah terjadi kekejaman dan penganiayaan berat hingga membahayakan seperti yang dimaksud pasal 19 huruf (e) PP No.9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (d) KHI, maka alasan diterima dengan alasan hukum. Dalam konsep ini ada pemilahan dan perbedaan tentang KDRT sebagai perbuatan Pidana tertentu yang berbeda dengan hukum perkawinan yang bersifat Perdata yang tidak dapat dicampur adukkan dalam perkaranya tapi dapat saling kaitkan karena keadaan tertentu.

Penerapan pasal-pasal Hukum Nasional di atas, tidak membuat Hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hakim Agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim Agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di Peradilan Agama. Jika praktek seperti ini mampu dilewati, para Hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak

kekerasan yang dialami korban, para Hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

Masalah keluarga yang berbuntut dengan perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam alasan-alasan perceraian antara lain putusnya perkawinan/perceraian (*poligami*, penelantaran, adanya pihak ketiga/perempuan lain selain istri, zina, dan perselingkuhan).

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun di sisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perceraian menjadi *gunting tajam* untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit kehidupan rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada umumnya keputusan perceraian ini diambil setelah berbelas tahun bahkan berpuluh tahun bertahan dalam kondisi yang *abusive*. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga (*incest* dan *marital rape*), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menjelaskan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan, sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pematik, penjudi yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran.

Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian juga harus di dasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan.

Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk *kemaslahatan* kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain.

Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh Pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di Pengadilan

Agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian. Kasus-kasus yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya istri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- A.Rahman.I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul A'la Al Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987.
- Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acra Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 5, Jakarta, 2008.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, Al-Huda, Jakarta, 2005.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa.Sumatra, Bandung, 1978.

- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.
- S.Lev., *Islamic Courts In Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, PT.Intermasa, Jakarta, 1980.
- E.Koswara, *Agresi Manusia*, Rosda Offset, Bandung, 1988.
- E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001.
- ....., *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.
- ....., *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.
- Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'rif, Bandung, 1966.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.
- Harsja W. Bachtiar, Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode Wawancara, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Koentjaraningrat, Metode Wawancara, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, Rasindo, Jakarta, 1994.
- M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.



- M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Jilid I, P.T.Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 1996.
- Mohammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Mohd.Idris.Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979.
- Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- ....., *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syekh Muhamad bin Qosim Al Khozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992.
- Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979.
- W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV.Al Hidayah, Jakarta, 1964

